



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Walikota Surakarta tanggal 30 Agustus 2022 Nomor HK/3418/2022 perihal Pengajuan Perubahan Propemperda Tahun 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022;**
 - b. bahwa sesuai Pasal 6 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “dalam hal terjadi Perubahan Propemperda harus ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD”;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 4 Oktober 2022;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 5 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Perubahan Kedua atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar pengajuan

pembahasan peraturan daerah dan merupakan skala prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta memuat daftar Kumulatif Terbuka.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Oktober 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI PRASETYO

Tembusan :

1. Walikota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Inspektur Kota Surakarta;
4. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
 21 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN
 2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	Pengarusutamaan Gender	1. Asas dan tujuan 2. Tugas dan wewenang 3. Rencana aksi 4. Kelembagaan	√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√		1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	TAHUN 2022	

			5. Partisipasi masyarakat 6. Pendanaan			2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender beserta Perubahanya			2. Bagian Hukum		
--	--	--	---	--	--	---	--	--	-----------------	--	--

2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Perda	Penanaman Modal	1. Penjelasan umum peraturan daerah 2. Menyangkut kebijakan dasar sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah 3. Sudah tidak sesuai dengan perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal 4. Klausul pemberian insentif / kemudahan penanaman modal		√	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	√		1. Bagian Hukum 2. BPPKAD 3. Bappeda 4. Bagian Perekonomian dan SDA 5. Dinas Koperasi dan UMKM 6. Bagian Kerjasama 7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	TAHUN 2022	

			5. Klausul perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dan UMKM lokal								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Perda	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta	1. Bentuk badan hukum 2. Maksud, fungsi dan tujuan 3. Permodalan 4. Tata cara penyertaan modal 5. Logo, kedudukan, asset dan organ 6. Tata cara evaluasi 7. SPI 8. Rencana kerja dan lapangan 9. Laba perusahaan 10. Pinjaman	√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah		√	1. Bagian Hukum 2. BPPKAD 3. BAPPEDA 4. Inspektorat 5. Bagian Perekonomian 6. BUMD terkait	TAHUN 2022	
2.	Perda	Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta	1. Bentuk badan hukum 2. Maksud, fungsi dan tujuan 3. Permodalan 4. Tata cara penyertaan modal 5. Logo, kedudukan, asset dan organ 6. Tata cara evaluasi		√	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√		1. Bagian Hukum 2. BPPKAD 3. BAPPEDA 4. Inspektorat 5. Bagian Perekonomian 6. BUMD terkait	TAHUN 2022	

			7. SPI 8. Rencana kerja dan lapangan 9. Laba perusahaan 10. Pinjaman								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Perda	Pengelolaan Sampah	1. Asas dan tujuan 2. Jenis produk hukum daerah yang bersifat penetapan 3. Tata cara penyusunan program pembentukan produk hukum daerah 4. Evaluasi dan klarifikasi 5. Dokumentasi dan penyebarluasan		√	1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah		√	1. Bagian Hukum 2. Dinas perdagangan 3. Satpol PP 4. Dinas Perumahan dan kawasan permukiman 5. BAPPEDA 6. DLH 7. Kecamatan Laweyan 8. Kecamatan Banjarsari 9. Kecamatan Jebres 10. Kecamatan pasar Kliwon 11. Kecamatan Serengan	TAHUN 2022	

						3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampag Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah spesifik					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Perda	Penyelenggaraan Reklame	1. Asas dan tujuan 2. Ruang lingkup 3. Tugas dan wewenang 4. Perencanaan 5. Jenis 6. Perizinan 7. Larangan 8. Penataan 9. Sanksi administratif	√		1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	√		1. BPPKAD 2. Inspektorat 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. BAPPEDA 6. Bagian Hukum	TAHUN 2022	

6. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Perda	Penyelenggaraan Perhubungan	1. Asas dan tujuan 2. Jenis Produk Hukum yang bersifat pengaturan 3. Jenis produk hukum yang bersifat penetapan 4. Tatacara program pembentukan produk hukum daerah 5. Evaluasi dan klarifikasi 6. Dokumentasi dan penyebarluasan		√	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	√		1. Kepolisian RI 2. Bagian Hukum	TAHUN 2022	

						3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

7. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Perda	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren		√				√		TAHUN 2022	
2.	Perda	Pengelolaan Sistem Drainase		√				√		TAHUN 2022	
3.	Perda	Ketenagakerjaan		√			√			TAHUN 2022	

						2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
21 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN
2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA KOTA SURAKARTA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan		√	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	TAHUN 2022	

						Keuangan Daerah					
2.	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan, Dan Antar Jenis Belanja	√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		√	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	TAHUN 2022	
3.	Perda	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Rencana Keuangan Tahunan Daerah	√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah		√	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Tahun 2022	

4.	Perda	Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja		√			√			TAHUN 2022	
----	-------	---	--	---	--	--	---	--	--	------------	--

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO